



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H. SASMIRUDDIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 6981

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.040.000.000

1. Tanah Seluas 416 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah Seluas 7605 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 416 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 616 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1189 m2/255 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. ----

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 100.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 42.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.082.100.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.082.100.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.